

1. LATAR BELAKANG

Tuntutan bagi perusahaan untuk meningkatkan pemeliharaan lingkungan semakin meningkat, seiring dengan kesadaran masyarakat akan peran penting pelestarian lingkungan. Tuntutan tersebut merupakan hal yang wajar bagi perusahaan sebab perusahaan menggunakan berbagai sumber daya yang ada di lingkungan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga upaya untuk bertanggung jawab terhadap masalah sosial (*corporate social responsibility*) dengan menyisihkan sebagian dari keuntungan yang didapatkan untuk memelihara lingkungan sudah seharusnya bagi perusahaan. Tuntutan *corporate social responsibility* bukan merupakan paksaan bagi perusahaan, tetapi merupakan kewajiban yang sebaiknya dilakukan dengan penuh rasa kesadaran. Pada perkembangan bisnis adanya tuntutan terhadap *corporate social responsibility* membuat pihak *stakeholders* (pihak yang berkaitan dengan perusahaan) berhati-hati dalam rangka pengambilan keputusan terhadap perusahaan.

Pihak *stakeholders* akan cenderung bekerja sama dengan perusahaan yang mampu memenuhi *corporate social responsibility* dengan baik daripada perusahaan yang tidak memenuhi *corporate social responsibility* dengan baik, karena apabila perusahaan tidak mampu memenuhi *corporate social responsibility* dengan baik maka perusahaan akan menerima hukuman denda bahkan pencabutan izin usaha, sehingga membuat perusahaan tidak mampu meneruskan kelangsungan hidup usaha yang dimiliki. Devina dkk (2004) mendukung hal tersebut dengan pernyataan bahwa dewasa ini pihak *stakeholders* menekan perusahaan dalam operasi bisnis yang dilakukan untuk bertanggung jawab terhadap dampak sosial yang timbul akibat aktivitas bisnis yang dilakukan atau menerapkan *corporate social responsibility*.

Investor adalah contoh dari *stakeholders* yang harus memperhatikan masalah *corporate social responsibility* perusahaan. Investor memiliki kepentingan untuk menanamkan dana yang dimiliki di perusahaan berupa investasi. Bila investor tidak memperhatikan perusahaan yang bersangkutan, dapat saja keputusan untuk menanamkan dana yang dimiliki menjadi salah. Investor tidak boleh hanya memperhatikan laporan keuangan yang memberikan informasi

tentang kondisi keuangan perusahaan saja untuk mengambil keputusan, tetapi informasi tentang kinerja perusahaan berkaitan dengan upaya untuk memenuhi tanggung jawab sosial yang dimiliki juga sangat penting. Investor dapat saja kehilangan dana yang ditanamkan apabila perusahaan yang dari sisi keuangan dinilai baik namun tidak mampu memenuhi tanggung jawab sosial yang dimiliki, sehingga ijin usaha perusahaan harus dicabut dan mengakibatkan perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha yang dimiliki. Zuhroh dan Sumawati (2003) memberikan ketegasan dari paparan yang ada bahwa investor telah memiliki respon informasi-informasi sosial yang disajikan oleh perusahaan dalam laporan tahunan. Semakin luas pengungkapan sosial yang dilakukan perusahaan dalam laporan tahunan memberikan peningkatan terhadap perdagangan saham. Kondisi yang ada juga menunjukkan adanya kesadaran pihak investor untuk memilih perusahaan yang memenuhi tanggung jawab sosial dengan baik sebagai tempat melakukan kegiatan investasi, karena dianggap lebih menjamin keamanan dana yang diinvestasikan serta keuntungan yang didapatkan.

Laporan keuangan bila tidak memperhatikan pengungkapan sosial membuat laporan keuangan tidak mampu memberikan prediksi tentang kelangsungan hidup perusahaan di masa mendatang. Hal ini membuat tidak hanya investor saja yang enggan menggunakan laporan keuangan sebagai informasi penting untuk melakukan pengambilan keputusan berkaitan dengan perusahaan, namun pihak-pihak lain juga akan melakukan hal yang sama. Kreditor sebagai contoh dari bentuk *stakeholders* yang lain, juga tidak akan memiliki kepercayaan terhadap laporan keuangan yang disajikan karena dapat saja melakukan kesalahan prediksi dengan informasi yang disajikan laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan tentang pemberian kredit terhadap perusahaan. Bila hal ini terus dibiarkan maka laporan keuangan makin mengalami penurunan kualitas, tidak mampu memenuhi persyaratan relevan dan reliabel. Laporan keuangan menjadi tidak relevan karena tidak sesuai dengan kondisi yang ada dan menjadi tidak reliabel karena tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan akibat sifat laporan keuangan yang menyesatkan bagi pemakai dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan, maka laporan keuangan saja tidak cukup menjadi informasi di masa sekarang. Akuntan sebagai penyedia laporan keuangan harus berusaha untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan untuk mempertahankan peran yang dimiliki. Laporan keuangan harus mulai memasukkan unsur tanggung jawab sosial perusahaan sebagai informasi tambahan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengambilan keputusan. Hal tersebut diharapkan mampu mengembalikan peran laporan keuangan sebagai informasi berkualitas yang berguna untuk dasar pengambilan keputusan dengan memenuhi nilai relevansi dan reliabilitas yang dimiliki. Pada praktik akuntansi yang terjadi, hal tersebut bukan merupakan hal yang mudah sebab tanggung jawab sosial ada yang memiliki unsur penilaian secara kualitatif, sedangkan laporan keuangan lebih banyak menekankan pada unsur penilaian secara kuantitatif berupa satuan moneter. Untuk mengatasi hal tersebut maka dibutuhkan peran dari pengungkapan laporan keuangan terhadap pertanggungjawaban sosial yang dilakukan oleh perusahaan.

Peran dari pengungkapan laporan keuangan untuk memberikan informasi tambahan, termasuk bagaimana *corporate social responsibility* dikembangkan secara implisit telah disarankan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2007) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 yang menyatakan perusahaan dapat melakukan pengungkapan sebagai informasi tambahan baik yang bersifat keuangan dan non keuangan. Pernyataan tersebut merupakan peluang untuk membentuk kepedulian akuntansi terhadap masalah sosial untuk melaporkan pertanggungjawaban sosial perusahaan pada laporan keuangan. Upaya tersebut diharapkan akan meningkatkan kualitas dari laporan keuangan dan memposisikan kembali peran laporan keuangan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Zuhroh dan Sumawati (2003) menyatakan bahwa pengungkapan ada yang bersifat wajib (*mandatory*) dan sukarela (*voluntary*). Pengungkapan yang bersifat wajib merupakan pengungkapan informasi yang wajib dilakukan perusahaan berdasar peraturan atau standar tertentu, sedangkan yang bersifat sukarela merupakan pengungkapan informasi yang melebihi persyaratan minimum dari

peraturan yang berlaku dengan tujuan untuk memberikan informasi tambahan kepada pihak yang menggunakan laporan keuangan. Pertanggungjawaban sosial yang dapat dipenuhi oleh perusahaan dan dapat diukur dalam satuan moneter seperti berbagai biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan lingkungan tetap akan menjadi bagian dalam laporan keuangan, baik itu sebagai aktiva di neraca bila memenuhi unsur aktiva atau sebagai biaya pada laporan laba rugi untuk memenuhi unsur biaya. Contoh tersebut merupakan pengungkapan yang bersifat wajib pada laporan keuangan, sedangkan pada unsur pertanggungjawaban sosial yang tidak dapat diukur dalam satuan moneter serta tidak memenuhi elemen yang ada di laporan keuangan maka sebaiknya tetap disajikan berupa informasi kualitatif pada pengungkapan atas laporan keuangan. Contoh dari pengungkapan tersebut adalah upaya yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan sistem keselamatan kerja, penciptaan produk yang tidak merusak lingkungan, kebijakan perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan usaha dan sebagainya. Pengungkapan tersebut merupakan pengungkapan yang bersifat sukarela pada laporan keuangan namun dengan adanya keberadaan pengungkapan tersebut akan lebih memberikan nilai tambah atas informasi yang disajikan oleh laporan keuangan berkaitan dengan penggunaan informasi dari laporan keuangan bagi pihak yang berkepentingan. Berdasarkan kondisi yang ada maka amat penting bagi akuntan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan pada laporan keuangan.

2. POKOK BAHASAN

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan maka pokok bahasan dalam makalah ini adalah peran pengungkapan tanggung jawab sosial untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.

3. TUJUAN PEMBAHASAN

Tujuan pembahasan yang diharapkan dapat dicapai adalah memberikan pemahaman tentang peran pengungkapan tanggung jawab sosial untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.

4. KAJIAN LITERATUR

4.1. Laporan Keuangan: Definisi, Tujuan, dan Karakter Kualitatif

Darsono dan Ashari (2005:15) menyatakan bahwa laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan memuat informasi tentang pelaksanaan tanggung jawab manajemen. Laporan keuangan merupakan pernyataan manajemen tentang kondisi perusahaan dalam bentuk mata uang. Hal ini mengindikasikan bahwa laporan keuangan sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari manajemen yang merupakan pertanggungjawaban atas kewenangan untuk mengelola sumber daya yang diserahkan oleh pemilik. Laporan keuangan juga merupakan sarana prediksi kinerja perusahaan di masa mendatang.

Ikatan Akuntan Indonesia (2007) dalam Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan menyatakan tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan.

Ikatan Akuntan Indonesia (2007) dalam Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan menyatakan bahwa karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Ada empat karakteristik kualitatif pokok yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk dapat dipahami pemakai, yang diasumsikan memiliki pengetahuan memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.

2. Relevan

Informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengkoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu.

3. Keandalan

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Informasi mungkin relevan tetapi jika hakekat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

4. Dapat dibandingkan

Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (tren) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antar periode perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda.

Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat diperbandingkan adalah informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. Pemakai harus dapat mengidentifikasi perbedaan kebijakan akuntansi yang diberlakukan dari satu periode ke periode dan dalam perusahaan yang berbeda. Ketaatan pada standar akuntansi keuangan, termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan akan membantu pencapaian daya banding.

4.2. Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan: Definisi dan Teori Pendukung

Budiarsi (2005:115) menyatakan bahwa ide pertanggungjawaban sosial perusahaan berawal dari bagaimana kewajiban perusahaan untuk memberikan perhatian kepada lingkungannya, akibat dampak dari kegiatan operasional yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Perusahaan yang pada awalnya hanya berkecukupan pada masalah keuangan saja harus memperhitungkan aspek dari dampak lingkungan sosial dalam menjalankan kegiatan operasi bisnis untuk mempertahankan diri dari tekanan sosial berbagai pihak melalui program pertanggungjawaban sosial perusahaan.

Moir (2001, dalam Sulistyowati, 2004) menyatakan bahwa ada beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis dan menjelaskan tentang adanya pertanggungjawaban sosial perusahaan. Beberapa teori tersebut adalah sebagai berikut ini:

1. *Stakeholders theory*

Pada *stakeholders theory* ini, dideskripsikan perusahaan memiliki kerjasama dengan berbagai pihak yang dikenal sebagai *stakeholders*, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Kerjasama yang dilakukan akan mendatangkan tuntutan bagi perusahaan untuk bertanggungjawab kepada pihak *stakeholders*. Pada perkembangan yang terjadi, masyarakat di sekitar perusahaan juga merupakan bagian dari *stakeholders* sehingga perusahaan harus bertanggung jawab terhadap masalah sosial yang dihadapi, berkaitan dengan masyarakat luas yang ada di sekitar perusahaan.

Kemampuan perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab sosial yang dimiliki, akan mendatangkan manfaat bagi perusahaan itu sendiri. Kemampuan untuk memenuhi tanggung jawab sosial yang dimiliki perusahaan akan mengakibatkan adanya kemampuan untuk meningkatkan reputasi atau nilai perusahaan itu sendiri. Perusahaan yang mampu memenuhi tanggung jawab sosial yang dimiliki akan dikenal sebagai perusahaan yang tidak memiliki masalah, sehingga akan mendatangkan banyak tawaran dari pihak *stakeholders* lain seperti investor dan kreditor

yang berminat untuk bekerja sama dengan perusahaan melalui upaya investasi atau pemberian kredit guna memperkuat struktur modal yang dimiliki perusahaan agar mampu memperluas kegiatan usaha yang dimiliki. Pada *stakeholders theory*, perusahaan yang tidak mampu memenuhi tanggung jawab sosial dengan baik akan membuat *stakeholders* tidak tertarik untuk bekerja sama dengan perusahaan. Perusahaan yang tidak mampu memenuhi tanggung jawab sosial yang dimiliki membuat banyak pihak memiliki pandangan negatif terhadap perusahaan tersebut. Perusahaan juga memiliki risiko untuk dituntut secara hukum yang akan mendatangkan hukum atau denda sehingga membuat *stakeholders* enggan untuk melakukan kerja sama dengan perusahaan. Perusahaan yang mengalami kondisi tersebut akan cenderung mengalami kemunduran akibat keterbatasan sumber daya sebab banyak pihak memiliki sumber daya menghindari kerja sama dengan perusahaan.

2. *Social contract theory*

Pada *social contract theory*, perusahaan dalam upaya melakukan kegiatan usaha tidak akan lepas dari masalah sosial sebab perusahaan merupakan anggota masyarakat yang melakukan kontrak sosial dengan masyarakat itu sendiri. Perusahaan tidak boleh hanya memperhatikan kepentingan masalah komersial saja, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan sosial. Pada *social contract theory*, kegiatan kontrak sosial yang dilakukan oleh perusahaan melahirkan adanya tuntutan bagi perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap masalah sosial yang timbul akibat pendirian dan operasi perusahaan.

3. *Legitimacy theory*

Legitimacy theory mendeskripsikan upaya untuk memenuhi tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan berkaitan dengan masalah hukum. Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha dibatasi oleh hukum yang berlaku pada negara tempat perusahaan itu berdiri. Perusahaan yang tidak mampu memenuhi hukum yang berlaku akan mendapatkan sanksi sesuai dengan hukum yang bersangkutan. Permasalahan tanggung jawab sosial

perusahaan pada umumnya juga dilindungi dalam hukum yang berlaku, dalam arti bagi perusahaan yang tidak menjalankan tanggung jawab sosial akan menghadapi tuntutan secara hukum. Berdasarkan kondisi tersebut maka perusahaan yang enggan memiliki urusan dengan hukum berkaitan dengan masalah sosial akan memilih memenuhi hukum yang berlaku termasuk memenuhi tanggung jawab sosial yang dimiliki.

4.3. Tanggung Jawab Sosial dan Kaitannya dengan Akuntansi

Tanggung jawab sosial sebagai keharusan membuat bidang akuntansi harus turut memperhatikan masalah tersebut apabila tidak ingin kehilangan peran yang dimiliki. Perkembangan dalam bidang akuntansi terkait dengan masalah tanggung jawab sosial melahirkan bidang akuntansi baru, yang dikenal dengan akuntansi sosial, yaitu adanya tinjauan dari akuntansi yang sudah ada untuk melakukan pelaporan terhadap kinerja sosial yang dimiliki perusahaan dalam rangka menyajikan laporan keuangan. Belkaoui (2000:230) berpendapat bahwa dukungan sepenuhnya pada pelaporan sosial perusahaan berkaitan dengan pengembangan akuntansi yang sudah ada, disajikan oleh perusahaan yang:

1. Mengasumsikan bahwa tujuan pelaporan sosial perusahaan adalah untuk meningkatkan citra perusahaan dan adanya asumsi bahwa perusahaan yang melakukan pelaporan sosial adalah perusahaan yang memiliki perilaku baik secara asasi.

Adanya pelaporan sosial mendatangkan *image* pada banyak pihak di sekitar perusahaan terlebih yang berkepentingan dengan perusahaan, bahwa perusahaan yang bersangkutan memiliki tanggung jawan terhadap masalah sosial yang dihadapi, di mana tidak melakukan kecurangan atau berusaha untuk tidak merugikan pihak manapun dalam menjalankan usaha. Kondisi yang ada lambat laun akan meningkatkan citra perusahaan dalam berusaha yang akan membantu perusahaan tersebut di masa mendatang. Perusahaan yang memiliki citra baik membuat banyak pihak tertarik melakukan kerja sama dengan perusahaan sehingga ada kesempatan untuk memperluas usaha yang dimiliki dengan dukungan kerja sama dari banyak pihak tersebut.

2. Mengasumsikan bahwa tujuan pelaporan sosial perusahaan adalah untuk menghentikan pertanggungjawaban organisasi dengan asumsi kontrak sosial terjadi antara organisasi dengan masyarakat merupakan suatu paksaan.

Adanya pelaporan sosial yang dilakukan oleh perusahaan diharapkan makin meningkatkan kesadaran pengusaha, bahwa tanggung jawab terhadap masalah sosial yang timbul bukan paksaan, tetapi merupakan kesadaran sebagai pihak yang telah mendapatkan keuntungan dari lingkungan sosial. Perusahaan diharapkan tidak hanya mendapatkan manfaat dari lingkungan sosial namun juga sudah sewajarnya untuk sadar dalam upaya menjaga keseimbangan sosial dalam rangka menjalankan kegiatan usaha dalam rangka mendapatkan keuntungan yang diharapkan.

3. Mengasumsikan bahwa pelaporan sosial perusahaan secara efektif memperluas akan informasi akuntansi yang sudah ada dan bertujuan untuk memberi informasi kepada kepada yang membutuhkan.

Pelaporan sosial perusahaan diharapkan mampu memberikan informasi tambahan kepada pihak yang membutuhkan di samping informasi keuangan yang selama ini disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Informasi tambahan yang berkaitan dengan masalah sosial tersebut akan menjadi bagian penting untuk meningkatkan kemampuan pihak yang berkepentingan dalam rangka melakukan pengambilan keputusan yang tepat, terlebih pada saat di masa mendatang masalah sosial yang dihadapi perusahaan memiliki kaitan dengan kinerja keuangan perusahaan di masa mendatang.

Hastuti dan Indarto (2006) menyatakan bahwa tuntutan bagi akuntansi untuk melakukan pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan disebabkan laporan tanggung jawab sosial perusahaan juga memberikan pengaruh terhadap kondisi perusahaan dan perlu diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Kondisi yang ada juga menuntut keterlibatan akuntan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan keuangan. Berdasarkan kondisi yang ada, maka posisi pengungkapan tanggung jawab sosial pada laporan keuangan hendaknya ditempatkan dengan baik sehingga tidak malah menyebabkan penurunan kualitas laporan keuangan.

4.4. Posisi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial pada Laporan Keuangan

Suwardjono (2005:190) menyatakan pengungkapan tanggung jawab sosial bersifat *mandatory* atau wajib dilaporkan bila ada pengeluaran kas perusahaan (biaya) guna mempertahankan dan memperbaiki kondisi lingkungan sosial perusahaan. Contoh kejadian tersebut adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk kesehatan para pegawai, biaya pemasangan serta pemeliharaan mesin penyaring udara, biaya pengelolaan limbah dan sebagainya. Biaya-biaya tersebut akan memberikan informasi bagaimana tingkat pertanggungjawaban sosial perusahaan sesuai dengan lingkup bisnis yang dimiliki, yaitu pantas atau tidak jumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mengganti kerusakan sosial yang dilakukan. Bentuk tanggung jawab sosial dapat dilaporkan pada laporan laba rugi yang merupakan bagian dari laporan keuangan bila biaya ini dapat diukur dan dinilai dengan jelas.

Pengungkapan tanggung jawab sosial pada laporan keuangan dapat bersifat sukarela atau *voluntary report* yaitu adanya pengungkapan tanggung jawab sosial pada laporan keuangan bila berguna untuk memberikan nilai lebih bila dilaporkan, akan tetapi sifatnya tidak wajib (Suwardjono, 2005:190). Pengungkapan laporan keuangan adalah bagian lain dalam laporan keuangan yang disediakan untuk memberikan informasi-informasi yang tidak dapat diukur dan dinilai dalam satuan moneter. Bila transaksi yang tidak dapat diukur dan dinilai dipaksakan dalam laporan keuangan terkadang akan menyesatkan pemakai laporan keuangan karena estimasi-estimasi yang tidak mendasar akan menyebabkan kesalahan pada pengungkapan sehingga bila hal ini terjadi lebih baik dilakukan pengungkapan saja. Contoh laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang bersifat *voluntary* menurut Kholis (2002) adalah: kebijakan adanya prioritas lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di sekitar, kebijakan yang dilakukan guna meningkatkan kepuasan konsumen, serta kebijakan pengurangan tenaga kerja dan rekrutmen. Kebijakan-kebijakan tersebut tidak dapat diukur dengan satuan uang sehingga lebih baik untuk disajikan sebagai pengungkapan yang bersifat *voluntary* saja, sebagai nilai tambah bagi pemakai laporan keuangan.

5. PEMBAHASAN

5.1. Peran Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial pada Laporan Keuangan

Kesadaran masyarakat yang makin meningkat membuat perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasi usaha harus memenuhi tanggung jawab sosial, terutama pada saat menjalankan kegiatan operasi usaha yang dimiliki. Masyarakat umumnya menuntut adanya kegiatan operasional perusahaan yang berkaitan dengan kemampuan pemeliharaan lingkungan. Perusahaan diharapkan tidak hanya memikirkan upaya mendapatkan keuntungan yang seluas-luasnya dari kegiatan operasi usaha yang dilakukan, tetapi juga menjaga keseimbangan lingkungan sehingga tidak merugikan kepentingan masyarakat.

Tuntutan dari masyarakat akan tanggung jawab sosial perusahaan diperkuat oleh adanya tekanan pemerintah. Aturan pemerintah menetapkan bahwa perusahaan perlu menjaga keseimbangan lingkungan sekitarnya saat menjalankan kegiatan usaha. Pemerintah tidak akan segan untuk memutuskan hukuman sesuai aturan yang berlaku bila perusahaan melakukan pelanggaran, bahkan pemerintah dapat saja mencabut ijin usaha atau menutup perusahaan yang bersangkutan. Kondisi yang ada membuat adanya kinerja keuangan bukan merupakan jaminan bagi perusahaan untuk memiliki kemampuan dalam rangka mempertahankan serta mengembangkan kelangsungan usaha yang dimiliki.

Ketidakmampuan kinerja keuangan sebagai informasi penting dalam rangka memprediksi kelangsungan usaha di masa mendatang membuat laporan keuangan yang disajikan tidak memiliki peran lagi sebagai penyedia informasi bagi pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang hanya berfokus pada penyediaan informasi tentang prestasi kinerja keuangan perusahaan akan mendatangkan kesalahan bagi pengguna informasi tersebut dalam rangka memprediksi kelangsungan usaha. Perusahaan yang kinerja keuangannya diprediksi bagus berdasarkan laporan keuangan yang disajikan dapat saja harus akibat ijin usaha yang dimiliki dicabut oleh pemerintah, karena tidak mampu memenuhi tanggung jawab sosial. Akuntan sebagai penyedia laporan keuangan hendaknya berusaha menutupi kelemahan yang ada agar laporan keuangan tetap memiliki peran dalam rangka menyajikan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan.

Laporan keuangan hendaknya dilengkapi oleh informasi tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh manajemen perusahaan berkaitan dengan pemenuhan tanggung jawab sosial yang dimiliki. Adanya informasi tambahan akan upaya-upaya yang dilakukan perusahaan berkaitan dengan pemenuhan tanggung jawab sosial membuat pemakai laporan keuangan dapat melakukan pengambilan keputusan yang tepat sesuai dengan kepentingan yang dimiliki, karena prediksi tentang kelangsungan hidup perusahaan lebih dapat dilakukan. Harapan dengan adanya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai pelengkap laporan keuangan akan membuat pemakai laporan keuangan tidak tersesat hanya oleh adanya kemampuan untuk menghasilkan kinerja keuangan yang baik di saat ini, namun ada ancaman perusahaan harus menutup usaha yang dimiliki akibat ijin usaha yang dimiliki dicabut pemerintah karena pelanggaran pengabaian tanggung jawab sosial yang dimiliki. Laporan keuangan akan lebih berkualitas sebagai akibat adanya pengungkapan tanggung jawab sosial.

Peran pengungkapan tanggung jawab sosial untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan juga dapat dipaparkan berdasarkan karakteristik kualitatif laporan keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2007) dalam Standar Akuntansi Keuangan pada Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan, yang terdiri dari dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan. Pengungkapan tanggung jawab sosial akan mendatangkan peran untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan karena membuat laporan keuangan lebih dapat dipahami. Keberadaan pengungkapan tanggung jawab sosial tidak akan membuat informasi yang disajikan oleh laporan keuangan lebih sulit untuk dipahami, tetapi sebaliknya akan membantu pemakai laporan keuangan untuk memahami bagaimana kondisi perusahaan bukan hanya diukur berdasarkan kinerja keuangan saja, tetapi juga hal lain yang bersifat non keuangan dalam hal ini tentang kemampuan untuk memenuhi tanggung jawab sosial. Kemampuan untuk memahami kondisi perusahaan di masa mendatang berdasarkan kinerja non keuangan dan non keuangan berupa tanggung jawab sosial perusahaan tersebut, membuat pemakai laporan keuangan untuk lebih dapat memahami kelangsungan hidup perusahaan di masa mendatang.

Pengungkapan tanggung jawab sosial membuat kualitas laporan keuangan makin meningkat karena laporan keuangan bersifat lebih relevan. Pengungkapan tanggung jawab sosial akan meningkatkan relevansi laporan keuangan, sebab informasi yang disajikan pada laporan keuangan lebih mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Hal tersebut dicerminkan dari informasi yang disajikan tentang tanggung jawab sosial perusahaan serta kinerja keuangan, sebagai bahan prediksi kelangsungan hidup perusahaan di masa mendatang.

Peningkatan kualitas laporan keuangan melalui pengungkapan tanggung jawab sosial juga dapat terjadi, bila dinilai dari segi keandalan. Pengungkapan tanggung jawab sosial membuat laporan keuangan ditunjang oleh hal-hal lain yang akan lebih memungkinkan pemakai laporan keuangan untuk melakukan pengambilan keputusan yang potensial. Adanya pengungkapan tanggung jawab sosial membuat pemakai laporan keuangan untuk lebih memprediksi kelangsungan hidup perusahaan di masa mendatang. Hal ini akan membuat laporan keuangan tidak menyesatkan pemakainya dan lebih dapat diandalkan.

Pengguna laporan keuangan umumnya menggunakan informasi dari laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Informasi tersebut adalah tentang kinerja keuangan yang dimiliki oleh perusahaan sebagai prediksi bagaimana kinerja keuangan perusahaan di masa mendatang. Pada kondisi bisnis yang makin kompleks, kinerja keuangan bukan merupakan jaminan bagi perusahaan untuk menghasilkan kinerja keuangan yang baik di masa mendatang. Faktor lain seperti tanggung jawab sosial perusahaan juga merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan. Kondisi yang ada membuat perusahaan yang hanya menyajikan laporan keuangan tidak dapat dibandingkan satu dengan lainnya. Suatu perusahaan yang memiliki kinerja keuangan baik belum tentu lebih baik dari perusahaan lainnya. Hal ini disebabkan perusahaan yang bersangkutan tidak mampu memenuhi tanggung jawab sosial yang dimiliki, sehingga menghadapi berbagai ancaman denda bahkan penutupan usaha di masa mendatang. Perusahaan yang tidak memiliki kinerja keuangan sebaik perusahaan yang bersangkutan bisa saja lebih baik di masa mendatang karena mampu memenuhi tanggung jawab sosial yang dimiliki. Kondisi yang ada menghasilkan tuntutan untuk melakukan

pengungkapan tanggung jawab sosial, sebab akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga lebih dapat dibandingkan

5.2. *Mandatory* dan *Voluntary Report* sebagai Sarana Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Upaya untuk melibatkan tanggung jawab sosial sebagai bagian informasi pada laporan keuangan bukan merupakan hal yang mudah untuk dilakukan oleh akuntan. Laporan keuangan selama ini selalu menuntut adanya pengukuran dalam bentuk satuan moneter, sehingga hanya kegiatan ekonomi yang dapat dinilai dengan satuan moneter merupakan kegiatan ekonomi yang dapat dilaporkan pada laporan keuangan. Kegiatan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial seperti pembelian mesin penyaring asap dan pengelolaan limbah pabrik bukan merupakan hal yang sulit untuk diungkapkan pada laporan keuangan. Pembelian mesin penyaring asap dapat dilaporkan pada neraca perusahaan sebagai aktiva, sedangkan pengelolaan limbah pabrik dapat dibiayakan dan diakui pada laporan laba rugi perusahaan. Kedua kegiatan terkait dengan tanggung jawab sosial tersebut jelas merupakan kegiatan yang tidak sulit untuk disajikan guna meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Pengungkapan tanggung jawab sosial seperti yang dicontohkan juga merupakan pengungkapan yang sifatnya wajib (*mandatory*). Hal ini dikarenakan mampu memenuhi unsur-unsur atau persyaratan dari laporan keuangan. Bila tidak dilakukan pengungkapan akan membuat laporan keuangan yang disajikan tidak mampu menjalankan peran sebagai penyedia informasi yang berguna untuk melakukan pengambilan keputusan yang tepat, sesuai dengan kepentingan yang dimiliki. Pada praktik bisnis yang dilakukan, tidak semua kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan mudah untuk diungkapkan. Ada beberapa bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang tidak dapat diukur dalam satuan moneter, sehingga mendatangkan kesulitan untuk disajikan.

Berbagai kebijakan perusahaan tentang tanggung jawab sosial seperti: cuti karyawan, prosedur produksi untuk menghasilkan produk yang aman bagi konsumen, prioritas lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, dan sebagainya

merupakan hal-hal yang sulit untuk diukur dalam satuan moneter. Hal-hal tersebut juga akan mendatangkan nilai tambah bagi pemakai informasi laporan keuangan apabila diungkapkan. Kontradiksi antara relevansi dan reliabilitas (keandalan) membuat adanya kesulitan bila dipaksakan untuk diungkapkan dalam laporan keuangan. Bila tanggung jawab perusahaan seperti dicontohkan diungkapkan pada laporan keuangan maka akan membuat laporan keuangan lebih relevan tapi tidak reliabel, sebab memang lebih mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Laporan keuangan menjadi tidak reliabel karena akan dilakukan estimasi dalam satuan moneter untuk mengukur kebijakan tersebut. Estimasi yang dilakukan dapat saja menghasilkan pengukuran yang salah dan berakibat laporan keuangan akan menyesatkan pemakai.

Akuntan dapat menetapkan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sulit untuk diukur dengan satuan moneter sebagai pengungkapan yang bersifat *voluntary* (sukarela). Tanggung jawab sosial perusahaan yang sulit diukur dalam satuan moneter tersebut dapat disajikan pada bagian tersendiri dari laporan keuangan, sebagai informasi tambahan yang memberikan nilai tambah dari informasi yang disajikan pada laporan keuangan. Sifat dari penyajian tersebut tidak dipaksakan atau diharuskan, sesuai dengan kebijakan dari manajemen perusahaan. Adanya *voluntary report* tersebut akan membuat kualitas laporan keuangan tidak malah menurun akibat adanya kontradiksi relevansi dan reliabilitas namun malah dapat ditingkatkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial yang disajikan tersendiri meskipun sifatnya sukarela.

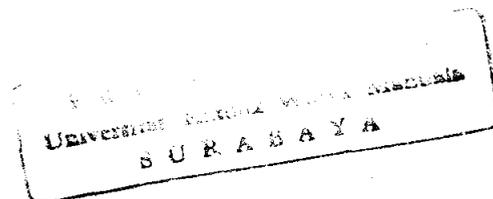
Contoh perusahaan yang melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial dalam bentuk *voluntary report* adalah PT. Antam, Tbk. *Voluntary report* dilakukan pada bagian tersendiri dari laporan keuangan dalam format yang dapat dilihat pada Lampiran 4 di makalah tugas akhir ini. Pengungkapan tanggung jawab sosial dalam bentuk *voluntary report* meliputi konsep tanggung jawab sosial perusahaan, standar etika perusahaan, pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan masyarakat, program pemberantasan pertambangan tanpa ijin, keselamatan kerja, serta upaya pengelolaan wilayah pasca tambang. *Voluntary report* dari manajemen PT Antam, Tbk akan mendatangkan manfaat untuk

meninjau pemenuhan pelaksanaan tanggung jawab sosial PT Antam Tbk, serta kaitannya dengan keuangan di masa mendatang, sehingga mampu menjadi nilai tambah atas penyajian informasi yang disajikan oleh laporan keuangan.

6. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Pengungkapan tanggung jawab sosial akan memberikan manfaat pada peningkatan kualitas laporan keuangan. Pengungkapan tanggung jawab sosial akan membuat laporan keuangan menjadi lebih dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan, sehingga mendatangkan manfaat untuk memprediksi kinerja perusahaan di masa mendatang bagi pihak-pihak yang membutuhkan.
2. Pengungkapan tanggung jawab sosial dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu secara wajib (*mandatory report*) dan sukarela (*voluntary report*). Pengungkapan tanggung jawab sosial secara wajib dilakukan apabila mampu memenuhi unsur-unsur atau persyaratan dari laporan keuangan, dan dilakukan secara sukarela apabila hanya bersifat sebagai informasi tambahan yang memberikan nilai tambah pada laporan keuangan itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

- Belkaoui, A.R., 2000, *Teori Akuntansi*, Edisi Bahasa Indonesia, Jakarta: Salemba Empat.
- Budiarsi, S.Y., 2005, Corporate Sustainability: Melalui Pendekatan Corporate Social Responsibility, *Majalah Ekonomi*, Tahun XV, No 2, Agustus: 115-133.
- Darsono dan Ashari, 2005, *Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan*, Yogyakarta: Andi.
- Devina, F., L. Suryanto, Zulaikha, 2004, Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Pengungkapan Sosial dalam Laporan Tahunan Perusahaan Go Publik di Bursa Efek Jakarta, *Jurnal Maksi*, Vol 4, Agustus: 161-177.
- Hastuti, T.D. dan S.L. Indarto, 2006, Penelitian tentang Pengungkapan Akuntansi Sosial Lingkungan Perusahaan, *Usahawan*, No. 2, Th XXXV, Februari: 47-52.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2007, *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Kholis, A., 2002, Masalah Sosial dalam Dunia Bisnis di Indonesia: sebuah Perspektif Akuntansi Sosial, *Media Riset Akuntansi, Auditing, dan Informasi*, Vol 2, No 3, Desember: 27-38.
- PT Antam, Tbk, 2005, Laporan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, *Annual Report*, http://www.antam.com/_new/images/stories/joget/file/annual/2005/indo/07CSR/report.htm Diakses pada tanggal 15 November 2008.
- Sulistiyowati, F., 2004, Pengungkapan Kinerja Sosial: Wujud Pertanggungjawaban Perusahaan Kepada Publik, *Antisipasi*, Vol 8, No 1, Hal 67-86.
- Suwardjono, 2005, *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan*, Edisi Ketiga, Yogyakarta: BPFE.
- Zuhroh, D. dan I.P.P.H. Sukmawati, 2003, Analisis Pengaruh Luas Pengungkapan Sosial dalam Laporan Tahunan Perusahaan terhadap Reaksi Investor, *Simposium Nasional Akuntansi VI*, Oktober: 1314-1327.